

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KARANGANYAR

Mirna Pradina¹⁾

Aris Eddy Sarwono²⁾

Dewi Saptantinah P.A³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

e-mail: ¹⁾mirnapradina9@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted on 41 Regional Apparatus Organizations in Karanganyar Regency, the type of data used is quantitative data. The data source used is primary data. The entire population in this study were all Civil Servants in the Karanganyar Regency. The sample used in this study was employees of finance in each Regional Apparatus Organization in Karanganyar Regency. The sampling technique is done by using purposive sampling method. This study shows that the Financial Accounting System, financial management, and accountability have significant impact on the performance of local governments. The moderation regression test results in this study indicate that internal supervision has the effect of strengthening financial management and accountability variables on local government performance as a moderating variable

Keywords: *Financial Accounting System, financial management, accountability, internal supervision*

PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah daerah mempunyai peran penting bagi masyarakat sebagai donatur dan pemilik kedaulatan sekaligus penyumbang dana, namun Pemerintah Daerah juga selaku Eksekutif, terutama untuk DPRD yang secara fungsional mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan fungsi legislasi dan fungsi anggaran (Ireeuw, 2019).

Berdasarkan berita yang dimuat pada (suaramerderkasolo.com) tahun 2018, Karanganyar memperoleh status WTP yang tercepat dari BPK sebelum masanya. Menurut Juliyatmono, status WTP bagi Karanganyar sudah biasa namun Karanganyar ingin melakukan hal yang lebih baik yaitu dengan mendapatkan status WTP sebelum masanya dan nyatanya sekarang bisa memperoleh status WTP tercepat. Setelah mendapatkan terobosa WTP plus, semua penghargaan yang sudah didapat kini menjadi sesuatu yang tidak lagi istimewa. Artinya bupati Karanganyar mendorong kepada semua OPD di setiap daerah, untuk mempercepat laporannya.

Dampak dari semua itu adalah pembangunan yang dikerjakan bisa dirasakan rakyat. Sehingga ke depan kesejahteraan dapat mengurangi angka kemiskinan serendah-rendahnya untuk dijadikan ukuran pembangunan. Sehingga pada saatnya, semua rakyat di daerah itu sudah makmur dan tidak miskin lagi. Karena itu penghargaan tersebut menjadi tantangan di masa depan. Jangan sampai setelah memperoleh penghargaan kinerjanya malah turun, namun sebaliknya harus semakin baik dan betul-betul berimbas hilangnya angka kemiskinan.

Karanganyar sudah menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha sebagai penghargaan tertinggi dari Presiden setelah tiga kali mendapatkan penghargaan berkinerja terbaik dan hadiahnya yaitu insentif dana alokasi khusus bagi daerah tersebut yang jumlahnya puluhan miliar atau bisa lebih dari Rp 100 miliar.

Pengukuran kinerja juga dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan dan akuntabilitas publik. Sistem akuntansi keuangan dilakukan dengan tepat maka bisa memperoleh laporan keuangan yang baik, laporan keuangan yang baik tersebut merupakan indikator bahwa organisasi mempunyai kinerja yang baik. Pemerintah bertanggungjawab atas laporan yang dihasilkan dalam setiap kegiatan atas amanah yang diberikan dari masyarakat. Maka semakin baik sistem akuntansi keuangan yang diterapkan organisasi maka semakin baik pula kinerja organisasi. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Damanik (2017) dan Ireeuw (2019) bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Pemerintah memerlukan pengelolaan keuangan dalam menentukan kinerjanya. Pengelolaan keuangan daerah berorientasikan pada kinerja menunjukkan bahwa terdapat akuntabilitas kinerja yang keterkaitan antara dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan ketepatan sasaran strategis yang ingin dicapai mempunyai pengaruh terhadap kinerja satu instansi atau organisasi. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Lintong (2017) dan Salle (2018) bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Ireeuw (2019) bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah juga dapat dilihat dari akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan kebutuhan didalam pengelolaan pemerintah pada bidang keuangan. Dengan adanya penerapan akuntabilitas akan mencipta kinerja pemerintah yang lebih baik. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Novantiati, dkk (2019) yaitu akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Jitmau, dkk (2018) menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Untuk menganalisis berpengaruh sstem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. 2) Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, 3) Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

TEORIAGENSI

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) teori keagenan adalah perjanjian antara satu atau lebih principal (masyarakat) dengan agen (pemerintah) implementasi dari teori keagenan berupa perjanjian yang berisi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Teori keagenan merupakan konsep dasar dari akuntansi sektor publik. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban menyajikan

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai principal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Kinerja pemerintah daerah didefinisikan sebagai gambaran dalam pencapaian tingkat pelaksanaan dari suatu kebijakan atau kegiatan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi yang ada dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2016). Kinerja program berhubungan dengan tanggungjawab pemerintah atas amanat yang diberikan dari masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas publik, disebabkan pemerintah mempunyai berkewajiban dalam melaksanakan program pembangunan dan menjalankan pemerintahannya.

A. Sistem Akuntansi Keuangan

Rasdianto (2013) menyatakan bahwa system akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai system akuntansi yang terdiri dari proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi meliputi aturan yang digunakan sebagai pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pelaporan untuk mengetahui posisi keuangan, arus kas dan kinerja dari waktu ke waktu. Maka kebijakan akuntansi yang digunakan dalam setiap periode yang diterapkan secara konsistensi.

B. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan terdiri dari pengurusan khusus dan pengurusan umum. Pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris, sedangkan pengurusan umum berkaitan dengan APBD. Fungsi pemerintah daerah penyelenggaraannya akan terlaksana dengan maksimal apabila penyelenggaraan kebutuhan pemerintah dapat menerima pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan berpedoman pada undang-undang mengenai perimbangan keuangan pemerintah daerah dengan pusat yang besarnya disesuaikan pada pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini.

C. Akuntabilitas

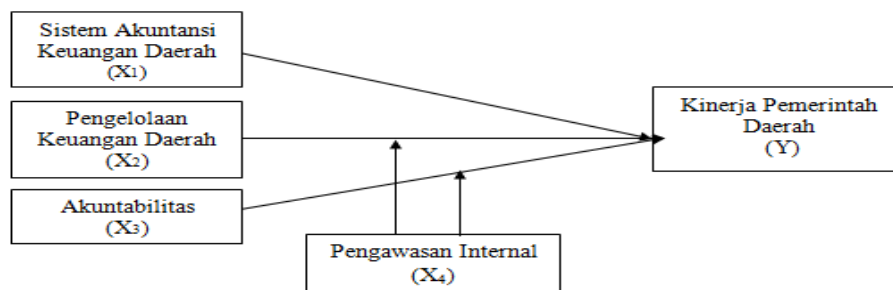
Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah (agen) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi amanah (Mahmudi, 2015). Akuntabilitas merupakan prinsip dari *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas dapat menciptakan sistem kontrol secara efektif.

D. Pengawasan Internal

Menurut Mulyadi (2010) menyatakan bahwa pengawasan internal terdiri dari metode, struktur organisasi dan ukuran-ukuran yang digunakan untuk menjaga kekayaan organisasi, keandalan dan mengecek ketelitian data akuntansi, mendorong kepatuhan dan efisiensi dan kebijakan manajemen.

Pengawasan digunakan untuk mengerahui perencanaan yang disusun dapat berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif. Jika pengawasan dapat dilakukan secara sistematis dan efektif pada pengelolaan keuangan daerah, maka pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah mampu bersifat transparan digunakan untuk memberikan keyakinan terhadap informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan sudah benar atau valid (Mahayuni dkk, 2017).

Model dan Hipotesis Penelitian



Berdasarkan model diatas maka hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

H₂ : Pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

H₃ : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang diberikan kepada OPD di Kabupaten Karanganyar yang diberikan secara langsung kepada pemerintan tersebut dan untuk pengambilannya akan diambil sendiri oleh peneliti sesuai kesepakatan pengambilan kuesioner, disisi oleh responden yang bersangkutan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk melakukan penelitian pada suatu populasi atau sampel, data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2008). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang didistribusikan kepada staf bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data di dapat dari angket yang diberikan kepada responden, kemudian responden yang akan menjawab pertanyaan sistematis.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) data sekunder yaitu data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, biasanya dalam bentuk file dokumen atau melalui orang lain.

Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto (2013) populasi di definisikan sebagai keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi yaitu individu yang memiliki sifat sama atau seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara berjumlah 1.523 orang yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) OPD, yang terdiri dari dinas/badan/kantor sebanyak 24 (dua puluh empat), kecamatan sebanyak 17 (tujuh belas).

2. Teknik Pengumpulan sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan yaitu Aparatur Sipil negara di bagian keuangan pada OPD di Kabupaten Karanganyar.

3. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang diteliti Arikunto (2013). Sampel penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*. Kuesioner akan disebarkan kepada responden di 41 (empat puluh satu) OPD. Sampel dalam penelitian ini adalah bagian keuangan disetiap OPD. Kuesioner yang kembali digunakan sebagai data penelitian.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan meliputi pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R^2).

Uji Instrumen

Instrumen Sistem Akuntansi Keuangan (X_1) sebanyak 8 butir pernyataan, Pengelolaan Keuangan (X_2) 8 butir pernyataan, Akuntabilitas (X_3) 9 butir pernyataan, Pengawasan Internal (X_4) sebanyak 5, dan Kinerja pemerintah daerah (Y) 9 butir pernyataan melalui uji Korelasi Pearson menunjukkan semua butir pernyataan valid, ditunjukkan dengan $p(0,000) < 0,05$. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa seluruh instrument variabel sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, pengawasan internal, dan kinerja pemerintah daerah dinyatakan reliabel ditunjukkan dengan nilai *Cronbach Alpha* (0,867; 0,817; 0,856; 0,864 dan 0,840) $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan bantuan *software* SPSS didapatkan hasil bahwa semua instrumen dalam penelitian ini lolos dalam uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas, sehingga semua instrumen dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji normalitas	$p\text{-value } 0,200 > 0,05$	Residual normal
Uji multikolinieritas	Tolerance (0,465; 0,344; 0,410) > 0,10 VIF (2,151; 2,911; 2,437) < 10	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Variabel	Coefficient	t-test	Sig.
1 (Constant)	11.071	4.099	.000
Sistem Akuntansi Keuangan	.203	2.027	.045
Pengelolaan Keuangan	.248	2.066	.041
Akuntabilitas	.324	3.395	.001
R^2	0,466		
Adj. R^2	0,454		
F-test	37.576		0,000

Berdasarkan analisis tersebut, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Karanganyar adalah variabel akuntabilitas (X3), karena nilai koefisien regresinya paling besar yaitu 0,324 diantara koefisien regresi variabel bebas yang lain yaitu sistem akuntansi keuangan (X1) sebesar 0,248, dan pengelolaan keuangan (X2) sebesar 0,203.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (t)

1. Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 2,027 dengan *probability value* sebesar $0,045 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan sistem akuntansi keuangan (X1) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Karanganyar.
2. Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 2.066 dengan *probability value* sebesar $0,041 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan pengelolaan keuangan (X2) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Karanganyar.
3. Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 3.395 dengan *probability value* sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan akuntabilitas (X3) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Karanganyar.

Uji Ketepatan Model

Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 37.576 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas sistem akuntansi keuangan (X1), pengelolaan keuangan (X2) dan akuntabilitas (X3) terhadap variabel terikat kinerja pemerintah daerah (Y) model regresi linear berganda yang digunakan sudah tepat.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,454 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu sistem akuntansi keuangan (X1), pengelolaan keuangan (X2), dan akuntabilitas (X3) terhadap variabel terikat yaitu kualitas audit (Y) di Kabupaten Karanganyarsebesar 45,4% sedangkan sisanya (100% - 45,4%) = 54,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil analisis diperoleh nilai *t* hitung sebesar 2,027 dengan *probability value* sebesar $0,045 < 0,05$ maka *H₀* ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan sistem akuntansi keuangan (X1) terhadap kinerja pemerintah (Y) di kabupaten Karanganyar. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar. Hal ini ditunjukkan dari sistem akuntansi keuangan meningkat maka meningkat juga kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu kinerja pemerintah daerah yang baik memerlukan sistem akuntansi keuangan yang baik pula, karena jika sistem akuntansi keuangan rendah pada suatu pemerintah maka dapat menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik. Sistem akuntansi keuangan dapat digunakan untuk membantu dalam pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan yang baik hal tersebut dapat menjadikan kinerja pemerintah daerah semakin baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Damanaik (2018) dan Ireeuw dkk (2019) menyebutkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil analisis diperoleh nilai *t* hitung sebesar 2,066 dengan *probability value* sebesar $0,041 < 0,05$ maka *H₀* ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan pengelolaan keuangan (X2) terhadap kinerja pemerintah (Y) di kabupaten Karanganyar. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang meningkat dapat meningkatkan pula kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar. Apabila pengelolaan keuangan yang dihasilkan rendah maka kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan juga akan rendah. Pengelolaan keuangan merupakan pengalokasian dana yang digunakan dalam pencapaian suatu tujuan. Apabila dalam pengalokasian dana yang dihasilkan sesuai dengan yang ditetapkan maka pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Hal ini sesuai dengan penelitian Salle dan Matani (2018) bahwa variabel pengelolaan keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,395 dengan *probability value* sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan akuntabilitas (X_2) terhadap kinerja pemerintah (Y) di kabupaten Karanganyar. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dicapai baik maka kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar juga meningkat baik. Apabila akuntabilitas yang dicapai rendah maka rendah pula kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas adalah wujud dari pertanggungjawaban atas wewenang dan tugas diberikan. Pertanggungjawaban tersebut digunakan untuk mengevaluasi atau menilai kegiatan yang sudah dilakukan sudah sesuai tujuan dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut didukung dengan penelitian Novatiani (2019) bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian variabel sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga semakin baik variabel tersebut maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- <https://suaramerdekasolo.com/2019/04/28/karanganyar-kembali-raih-kinerja-terbaik-pemerintahan/>. Diakses pada tanggal 26 September 2019
- Ireeuw, Layuk, Rante. 2019. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura)”. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. Vol. 14, No. 1, p. 87-99.
- Jensen, C., & Meckling, H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, p. 305–360.
- Jitmau, Kalangi dan Lambey. 2017. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sorong)”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”*. Vol. 8, No. 1, p. 276-286.
- Lintong, dkk. 2017. “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu”. *Jurnal Accountability*. Vol. 06, No. 01, p. 118-127.

- Mahayuni, Dkk. 2017. "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem". *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 8, No. 2.
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mohamad, Mahsun. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFY-YOGYAKARTA. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2010. *Sistem akuntansi*. Cetakan Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Novatiani, dkk. 2019. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. Vol. 10, No. 1, Maret, p. 51-61.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rasdianto, Erlina. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Brama Ardian.
- Rosmarini, Tri. 2016. "Pengaruh Pengawasan Intern, Sistem Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah". *Jom Fekon*. Vol. 3, No. 1, p. 950-964.
- Salle, Agustinus dan C.D. Matani. 2018. "Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Jayapura)". *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. Vol. 13, No. 2, p.105-122.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung